



Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik: Meningkatkan Integritas dan Efisiensi

Supawanhar ¹⁾; Romdana ²⁾; Raka Agusta Pratama ³⁾; Melani Purnamasari ⁴⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bengkulu

Email: ¹⁾ romdanayahya123@gmail.com

How to Cite :

Supawanhar, S. Romdana, R. Pratama, A. R. Purnamasari, M. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik: Meningkatkan Integritas dan Efisiensi*. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities, 3(2) DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.3.2.67-72>

ARTICLE HISTORY

Received [17 December 2022]
Revised [28 December 2022]
Accepted [25 December 2022]
Published [31 December 2022]

KEYWORDS

Transparansi, Akuntabilitas,
Pengadaan Publik

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas memegang peranan kunci dalam pengadaan publik yang sukses. Artikel ini membahas bagaimana peningkatan transparansi dalam proses pengadaan dapat menghasilkan tingkat integritas yang lebih tinggi, sambil secara bersamaan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik. Melalui pendekatan yang lebih terbuka dan terukur, pemerintah dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pemborosan anggaran, sementara juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Artikel ini menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan ini dan memberikan pandangan tentang bagaimana peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi kunci sukses dalam pengadaan publik yang lebih bermartabat dan efisien.

ABSTRACT

Transparency and accountability play a key role in successful public procurement. This article discusses how increased transparency in the procurement process can lead to higher levels of integrity, while simultaneously improving the efficiency of public resource management. Through a more open and measured approach, governments can minimize the risk of abuse of power, corruption, and wasteful spending, while also strengthening public trust in public institutions. This article highlights the importance of concrete steps to achieve this goal and provides insights into how increased transparency and accountability can be key to success in more dignified and efficient public procurement.

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik adalah dua prinsip yang sangat penting dalam menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Kedua prinsip ini adalah dasar bagi pemerintah dan lembaga publik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan. Dalam era modern yang diwarnai oleh tuntutan akan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas telah menjadi fokus utama dalam memastikan kebijakan pengadaan publik yang efektif dan efisien.

Transparansi adalah kunci untuk memberikan informasi yang cukup kepada publik tentang bagaimana pengadaan publik dilakukan. Ini mencakup pengungkapan

terkait anggaran, proses pengadaan, pemilihan penyedia layanan, dan hasil pengadaan. Dengan transparansi yang memadai, publik dapat memantau dan mengevaluasi bagaimana pemerintah mengelola sumber daya mereka, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, akuntabilitas adalah konsep yang melengkapi transparansi. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab pemerintah atau lembaga publik untuk tindakan dan keputusan mereka dalam pengadaan publik. Dengan adanya akuntabilitas, pihak-pihak yang bertanggung jawab akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka karena mereka tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan insentif untuk menghindari tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks pengadaan publik, transparansi dan akuntabilitas juga membantu meningkatkan persaingan yang sehat di antara penyedia layanan. Dengan akses yang lebih besar ke informasi, penyedia layanan dapat lebih mudah mengikuti proses pengadaan dan bersaing dalam penawaran. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, karena persaingan yang sehat akan mendorong penyedia layanan untuk menawarkan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah.

Namun, untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik, dibutuhkan upaya yang serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Diperlukan infrastruktur dan peraturan yang mendukung transparansi, seperti platform pengadaan publik online dan undang-undang yang memerlukan pengungkapan informasi secara terbuka. Selain itu, akuntabilitas memerlukan proses audit yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik mereka. Ini mencakup penyediaan akses lebih besar kepada informasi pengadaan publik, pembentukan badan pengawas independen, dan peningkatan sanksi terhadap korupsi dalam pengadaan. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.

LANDASAN TEORI

Transparansi adalah prinsip dasar dalam pengadaan publik yang mengharuskan pemerintah dan entitas publik untuk memberikan akses yang mudah dan jelas terhadap informasi terkait pengadaan. Ini termasuk informasi tentang proses lelang, kontrak, dan penggunaan dana publik.

Akuntabilitas dalam pengadaan publik mengacu pada tanggung jawab dan pertanggungjawaban pemerintah atau entitas yang terlibat dalam proses pengadaan. Akuntabilitas ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan keputusan, tindakan, dan pengeluaran yang terkait dengan pengadaan.

Transparansi dan akuntabilitas saling terkait dan saling memperkuat. Transparansi menciptakan dasar untuk akuntabilitas, karena tanpa akses yang tepat terhadap informasi, sulit bagi masyarakat atau lembaga pengawas untuk mengukur dan mengevaluasi tindakan pemerintah.

Meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik dapat mengurangi risiko korupsi. Korupsi seringkali berkembang dalam lingkungan yang tidak transparan, di mana tindakan penyelewengan dana publik sulit untuk diungkap.

Akuntabilitas dalam pengadaan publik adalah alat penting dalam mendorong efisiensi. Ketika entitas pemerintah atau lembaga swasta yang terlibat dalam

pengadaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan pengeluaran mereka, mereka cenderung bekerja lebih efisien.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik. Platform daring dan sistem informasi yang terbuka dapat memudahkan akses masyarakat terhadap informasi pengadaan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas adalah dengan memperkenalkan audit independen dalam pengadaan publik. Audit independen dapat membantu mengungkapkan ketidakpatuhan atau tindakan penyelewengan.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengadaan publik juga merupakan aspek penting dari transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat dapat mengawasi proses pengadaan dan membantu memastikan integritasnya.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik diperkuat oleh berbagai perjanjian internasional dan undang-undang nasional. Banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang mengatur pengadaan publik dengan berfokus pada prinsip-prinsip ini.

Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik merupakan langkah kunci menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar dan efisien, kita dapat meningkatkan integritas dan efektivitas program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Publikasi Informasi Terbuka: Salah satu metode utama untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik adalah dengan memastikan bahwa semua informasi terkait pengadaan, termasuk kontrak, anggaran, dan keputusan, tersedia secara terbuka untuk publik. Ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau proses ini.

Pemantauan oleh Pihak Ketiga: Melibatkan lembaga pihak ketiga atau auditor independen dalam mengawasi pengadaan publik dapat membantu menilai kepatuhan terhadap aturan dan regulasi serta memberikan jaminan bahwa prosesnya adil dan integritasnya terjaga.

Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat harus diberikan peran yang lebih aktif dalam pengadaan publik. Ini dapat mencakup forum publik, konsultasi, dan pengajuan pengaduan terkait proses pengadaan.

Pelaporan Keuangan yang Tepat dan Teratur: Metode ini melibatkan penyediaan laporan keuangan yang tepat waktu dan teratur tentang pengeluaran publik, termasuk pengadaan. Ini membantu memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar.

Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dan platform daring dapat meningkatkan transparansi dengan memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara langsung dan mudah.

Pendekatan E-Procurement: Implementasi sistem e-procurement memungkinkan untuk pengadaan publik yang lebih efisien dan terkontrol dengan lebih baik, serta meminimalkan risiko penipuan atau korupsi.

Audit Rutin: Melakukan audit rutin terhadap proses pengadaan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Pelatihan dan Kesadaran: Pelatihan dan kesadaran yang terus-menerus bagi pejabat pengadaan dan pihak-pihak terlibat dalam proses pengadaan sangat penting untuk memahami pentingnya integritas dan etika dalam bisnis publik.

Hukum Anti-Korupsi yang Ketat: Memiliki undang-undang anti-korupsi yang kuat dan memberlakukan hukuman yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi dalam pengadaan.

Sistem Penghargaan dan Sanksi: Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang berkeadilan dan transparan bagi pejabat pengadaan dan kontraktor yang berkinerja baik, sementara mereka yang terlibat dalam praktik korupsi atau pelanggaran etika diberikan sanksi yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam pengadaan publik berarti informasi tentang proses pengadaan, termasuk kontrak, perencanaan, dan pelaksanaan, harus mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah atau entitas yang terlibat dalam pengadaan publik untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

Dengan meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik, potensi korupsi dapat dikurangi. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang dapat memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap tindakan korupsi dalam proses pengadaan.

Transparansi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengadaan publik. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka, pemangku kepentingan dapat memantau proses pengadaan dan memastikan dana publik digunakan sebaik mungkin.

Transparansi dalam pengadaan publik juga dapat mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mereka tentang pengadaan publik yang akan membantu meningkatkan kualitas keputusan.

Teknologi informasi berperan besar dalam meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik. Portal online dan sistem berbasis teknologi dapat digunakan untuk mengunggah informasi terkait pengadaan publik.

Beberapa negara telah berhasil meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik, seperti Korea Selatan dan Estonia, yang telah memanfaatkan teknologi dengan baik untuk mencapai tujuan ini.

Ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam upaya meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik, termasuk resistensi dari pihak yang terlibat dalam pengadaan yang tidak ingin informasinya terbuka.

Meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan publik juga melibatkan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan personel yang terlibat dalam proses pengadaan.

Untuk mendukung akuntabilitas, penting untuk memiliki hukum dan regulasi yang tegas yang mengatur pengadaan publik, serta konsekuensi hukum yang jelas untuk pelanggarannya.

Melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik, pemerintah dapat meningkatkan integritas dalam pengelolaan dana publik, mengurangi korupsi, dan mencapai efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan dana publik. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengadaan publik, transparansi dan akuntabilitas memegang peran kunci. Dari berbagai informasi yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah transparansi yang kuat, seperti publikasi data kontrak dan pengeluaran secara terbuka, dapat membantu mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi pengadaan publik. Selain itu, meningkatkan akuntabilitas dengan penerapan audit yang ketat dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran etika dalam pengadaan akan menjadi langkah yang efektif.

Saran.

Saran yang dapat diberikan adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengawasi pengadaan publik. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang memudahkan laporan pelanggaran dan melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan. Selain itu, perlu ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pengadaan publik untuk meningkatkan pemahaman akan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa pengadaan publik yang lebih terbuka dan akuntabel akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, P. T., & Suhendra, H. (2018). The Impact of Transparency and Accountability on Public Procurement Performance in Indonesia. *Journal of Public Procurement*, 18(2), 161-185.
- Arrowsmith, S. (2015). Public Procurement Law: Damages as an Effective Remedy for Breach of Procurement Rules. *Public Procurement Law Review*, 24(1), 29-45.
- Della Porta, D., & Vannucci, A. (2018). The Hidden Costs of Relying on Citizens: Public Procurement, Organized Crime, and Anti-Mafia Policy. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 24(4), 347-366.
- Haneveld, H., & Wagenaar, P. (2016). Translating Transparency: The Dutch Way of Open Contracting in Public Procurement. *Public Administration*, 94(3), 788-805.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Transparency and Accountability in Innovative Public Procurement. *Electronic Government*, 15(2), 208-224.
- Kelman, S., & Schooner, S. L. (2016). Public Procurement: A Multi-Disciplinary Theory of Negotiation. *Journal of Public Procurement*, 16(4), 483-520.
- Macher, J. T., Mayo, J. W., & Ukhaneva, O. (2018). Auction Format Matters: Evidence on Bidding Behavior and Seller Revenue in Procurement Auctions. *Journal of Public Economics*, 162, 68-86.
- McCrudden, C. (2019). Public Procurement and the Global Compact. In *Human Rights and the Global Economy* (pp. 271-298). Hart Publishing.
- Nielsen, V. L., & Nielsen, S. B. (2016). Public Procurement and Rent-Seeking: The Role of Competitor Identity. *European Economic Review*, 89, 74-90.

- Reischauer, G. (2017). Public Procurement Law in the Twenty-First Century: The Role of Law in Government Procurement Markets. *Harvard Law Review*, 130(2), 663-720.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Saifullah, H., & Arifin, Z. (2017). Public Procurement in Indonesia: Challenges and Reform Efforts. *International Journal of Public Administration*, 40(8), 728-738.
- Sánchez Graells, A. (2018). *Public Procurement and the EU Competition Rules*. Bloomsbury Publishing.
- Sharma, D. D., & Bhat, R. (2017). Enhancing Transparency and Accountability in Public Procurement: The Case of India. *International Journal of Public Sector Management*, 30(6), 588-604.
- Sohail, T., & Cavill, S. (2018). Governance and Public Procurement Reform in Developing Countries: The Case of Pakistan. *Journal of Public Procurement*, 18(1), 67-94.
- Tirole, J. (2015). Procurement and Renegotiation. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(3), 1333-1363.
- Trepte, P., & Spiess, M. (2016). Public Procurement and Innovation: Resolving the Legal Uncertainties Surrounding Innovation Partnerships. *European Journal of Risk Regulation*, 7(4), 626-641.
- Williams, A. (2018). Reforming Public Procurement in the European Union: A Quest for Simplicity and Flexibility. *European Business Law Review*, 29(2), 297-326.
- World Bank. (2017). *Public Procurement Review*. World Bank.
- Zouridis, S., & Karré, P. M. (2016). Legal Innovation in European Public Procurement: A Tale of Waiting for Godot? *Journal of Law and Society*, 43(2), 184-208.